

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. ANALISIS PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KECAMATAN CINAMBO KELURAHAN BABAKAN PENGHULU KOTA BANDUNG

##### 1) Pembangunan

Pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pembangunan kewilayahan atau biasa juga disebut dengan pembangunan regional dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menurut Soekartawi (1990) dalam (Nurman, M.Si, 2015:175 "*Strategi Pembangunan Daerah*"), pembangunan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan dari pusat ke daerah atau yang biasa dikenal dengan istilah (spread effect). Bila pembangunan regional berjalan dengan baik, maka diharapkan daerah-daerah mengalami pembangunan yang mandiri didasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian, pembangunan dan kemajuan setiap daerah tidak menggantungkan pada pemerintah pusat, tetapi cukup didorong

oleh pemerintahan daerah sendiri. Sebagai implementasi dari pembangunan yang melibatkan masyarakat ditingkat Kewilayahan tentunya harus berorientasi kepada hasil yang bisa terukur berdampak positif bagi masyarakat, melalui pelaksanaan PIPPK. Sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung merancang PIPPK yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui inovasi masyarakat dalam menggagas program pembangunan berbasis pemberdayaan, sehingga masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung bisa mewujudkan “**Bandung Empowerment City**”.

Sebagai implementasi dari pembangunan yang melibatkan masyarakat ditingkat Kewilayahan tentunya harus berorientasi kepada hasil yang bisa terukur berdampak positif bagi masyarakat, melalui pelaksanaan PIPPK. Sebagaimana lazimnya pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan PIPPK harus didasarkan pada mekanisme atau proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan dan pertanggung jawaban, sehingga maksud dan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan PIPPK dapat dicapai dan dapat terlaksana dengan baik, termasuk hasilnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan PIPPK diperlukan keikutsertaan, serta keterlibatan masyarakat secara langsung pada seluruh tahapan proses pembangunan.

Adapun sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian efektif

## **2) Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejabaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Di samping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Pemberdayaan sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar dapat lebih pandai, mampu mengembangkan komunikasi antar mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada.

Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya melalui PIPPK serta sebagai akselerasi Pembangunan di Kota Bandung menjadi signifikan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan riil yang Nampak di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, PIPPK harus secara taktis menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal oleh model kebijakan sebelumnya sehingga implementasi PIPPK juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada melalui pemetaan dan perencanaan partisipatif oleh masyarakat ditingkat Kelurahan.

PIPPK dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam rangka menunjang program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 antara lain melalui akselerasi Pembangunan Daerah dengan metode pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama PIPPK.

Secara umum, selain partisipasi dari masyarakat sendiri tentunya partisipasi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah juga diharapkan dalam pelaksanaan PIPPK yaitu, menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, mendorong “pelebagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya inovasi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat, melakukan audit untuk semua pelaku PIPPK dan menjadi wasit perangkat Pemerintah Daerah untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat Pemerintah Daerah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan PIPPK, dibentuk organisasi pelaksana Tim Pengarah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TP-PIPPK) yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara merata, efektif dan juga efisien dapat dilihat dari berbagai dimensi dan indikator di atas. Dari dimensi dan indikator-indikator yang telah diambil tersebut, maka peneliti menyusun wawancara yang terdiri dari 21 pertanyaan yang kemudian diberikan kepada informan. Adapun hasil wawancara informan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tatang Rachman sebagai Lurah dari Kelurahan Babakan Penghulu pada tanggal 22 April 2018, Beliau mengatakan:

“PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) merupakan program baru di era nya Bapak walikota dan wakil walikota Bandung. Ini merupakan janji politik walikota waktu saat berkampanye akan menyampaikan anggaran 100 juta per RW, yang kedua PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) ini merupakan bagian dari segitiga manajemen yang di usung oleh bapak walikota dan bapak wakil walikota ada kolaborasi, inovasi dan desentralisasi. Dan ini merupakan asas desentralisasinya dimana anggarannya diturunkan ke tingkat level bawah sampai dengan kelurahan. Di dalam hal ini yang perlu disampaikan nanti mengakomodasi dari kebutuhan-kebutuhan dari RW” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Berdasarkan indikator rencana pembangunan dan pelaksanaan, yaitu sesuai dengan anggaran pembangunan, dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Bapak Tatang Rachman selaku Lurah mengatakan:

“Pengembangan perekonomian dalam PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) memang pada saat itu bapak walikota menyampaikan bahwa PIPPK juga tidak hanya tertumpu pada perbaikan infrastruktur atau perbaikan fisik sarana jalan, mck, dan lain sebagainya, akan tetapi juga bagaimana bisa mendorong kehidupan ekonomi masyarakat dan bahkan dapat dipresentasikan kurang lebih kisaran 20% bagaimana PIPPK itu bisa menjadi semacam modal bergulir atau dorongan untuk kegiatan ekonomi di tiap-tiap RW, di tiap-tiap LKK yang ada. Jadi kita mencoba arahnya kesana, walaupun Babakan Penghulu dapat dikatakan dipinggiran kota jadi masih tertumpu sebagian besar ke arah fisik, karena sarana prasarana jalan yang memang masih perlu di tingkatkan. Ke depan memang harus ada persentase bagaimana untuk kegiatan ekonomi. (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Sesuai dengan indikator, adanya pemerataan dan pertumbuhan dalam pembangunan serta tidak adanya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Babakan Penghulu, Bapak Tatang Rachman mengatakan:

“PIPPK ini meliputi wilayah Kota Bandung, jadi anggarannya disamaratakan rata-rata untuk tahun 2017 itu sudah dapat terakomodasi tiap RW, LKK, PKK, Karang Taruna, LPM itu 100 juta. Kemudian ada persoalan di tahun 2018, karena berdasarkan inputan kamus yang tadi yang belum bisa terakomodasi boleh jadi tidak menjadi 100 juta, mungkin di bawah itu. Tetapi yang jelas angka maksimalnya di 100 juta tiap LKK. Jadi, kalo misalkan sekarang ada 8 RW di Kelurahan Babakan Penghulu berarti ada 800 juta untuk 2017 ditambah tiga LKK menjadi 1,1 M. Untuk PIPPK sendiri sebetulnya bukan tergantung dari kebutuhan kelurahan, tapi tergantung kebutuhan atau prioritas garapan di tiap-tiap LKK. Kelurahan hanya bisa memfasilitasi, memberikan gambaran, ini loh LKK, RW, PKK, Karang Taruna, LPM. Kita mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai penerima manfaat., tetapi pertanggungjawabannya nanti ada di kita” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dalam sebuah pemerintahan tentunya tidak terlepas dari adanya dasar hukum sebagai bentuk dari legalitas program tersebut. Melihat adanya berbagai hambatan yang terjadi pada setiap realisasinya bapak Tatang Rachman selaku Lurah, beliau mengatakan:

“Berbicara hambatan, karena PIPPK ini seolah-olah dititipkan di anggarannya kelurahan, anggaran pemerintah tentu memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintah. Bagaimana cara menarik anggarannya, karena kita terkenal dengan setidaknya ada tiga sistem yaitu ada GU, TU, dan RS. Mungkin proses itu yang perlu dipahami juga oleh LKK sebagai penerima manfaat” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Selain adanya hambatan terdapat juga solusi untuk menghadapi hambatan tersebut, yaitu:

“Solusi untuk menghadapi hambatan tersebut tentunya kita harus bersosialisasi terus, memberikan pemahaman kepada LKK sebagai penerima manfaat, terus mereka harus semakin berdaya dan mempersiapkan diri untuk menyiapkan segala sesuatunya. (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Meskipun terdapat berbagai hambatan, program ini tentunya memiliki beberapa kelebihan, bapak Tatang Rachman mengatakan:

“Program ini mungkin apabila berbicara kelebihanannya itu banyak, tapi adapun kekurangan yang harus dibenahi adalah bagaimana proses input daripada kebutuhan dari masyarakat (LKK) yang lebih simple dan lebih bisa terakomodasi, karena selama ini mungkin input yang digunakan sudah melalui sistem e-budgeting sudah online aplikasinya, jadi mereka yang menginput itu sendiri. Ini yang kadang kala yang perlu ditingkatkan lagi kamus atau pilihan-pilihan apa untuk memasukan rencana-rencana kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan dari RW itu. Sedangkan kelebihan program ini adalah menjadikan masyarakat menjadi semakin berdaya, asas desentralisinya juga semakin bisa dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat menjadi lebih bisa berbuat sesuatu untuk menjadikan lingkungannya menjadi lebih baik dalam kegiatan-kegiatan yang lain” (Hasil wawancara 22 April 2018)

Dalam indikator programming tentunya tidak terlepas dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan adanya alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal dengan menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan pembangunan di masyarakat, bapak Tatang Rachman menyebutkan alternative program yang dibuat oleh pemerintah yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang mana memiliki tujuan:

“Tujuan dari PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) yaitu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bagaimana intinya adalah masyarakat dilevel paling bawah itu menjadi semakin berdaya, misalkan bagaimana akses jalannya, bagaimana kondisi sarana fasilitas umum yang mereka miliki agar lebih berdaya dan lebih baik lagi melalui PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) ini” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

“Mengenai PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan), program ini dapat dikatakan sangat bagus bahkan kalo memungkinkan itu ditingkatkan dan diteruskan. Ditingkatkan lagi



misalnya jumlahnya karena kebutuhan masing-masing RW, kebutuhan masing-masing lembaga, karena yang menerima PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) adalah LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan). Yang meliputi LKK tersebut ada RW, RT, PKK, Karang Taruna, dan LPM” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Untuk proses PIPPK di Kelurahan Babakan Penghulu yang dirasa sudah akuntabel atau belum, ibu Inda Choerul Bariah selaku Sekretaris Lurah mengatakan:

“Berbicara mengenai akuntabilitas tentu PIPPK ini harus dipertanggungjawabkan, setiap tahun kita ada pemeriksaan regular bahwa itu harus dipertanggungjawabkan, SPJ annya, dan lain sebagainya. Jadi akuntabilitasnya itu selain dari eksternal, internal pun kita tidak hanya di kelurahan saja tetap juga dengan kecamatan dan pemeriksaannya di inspektorat. Jadi akuntabilitasnya secara berjenjang terus harus bisa kita pertanggungjawabkan” (Hasil wawancara tanggal 22 April 2018)

“Di Babakan Penghulu untuk perbaikan sarana air bersih, untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan gorong-gorong, untuk pembuatan vertical garden, pembuatan MCK, perbaikan kantor RW, pembuatan gapura dan lain sebagainya karena banyak hal yang diperlu dilakukan melalui PIPPK. Untuk data mengenai apa saja dapat dilihat dalam administrasi. Karena ini merupakan program pemerintah, uangnya pemerintah tentu harus dipertanggungjawabkan dan setiap saat tentu ada evaluasi. Tidak hanya evaluasi di pemerintah kota tetapi di kecamatan juga kita terus di evaluasi karena kecamatan memiliki tim untuk memonitori PIPPK terdiri dari Sekcam, lembaga terkait, karang taruna tingkat kecamatan, PKK kecamatan, dan koordinator PIPPK kecamatan, termasuk forum RW. Itu selalu melakukan evaluasi kepada kegiatan-kegiatan PIPPK disamping kegiatan evaluasi internal di pemerintah kota tentang bagaimana penyerapan PIPPK” (Hasil wawancara 22 April 2018)

Mengingat sejauh mana pengetahuan masyarakat di Kelurahan Babakan Penghulu mengenai Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), dengan adanya pembangunan manusia untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya sangat

diperlukan, maka dalam hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah Ibu Ina Choerul Bariah, beliau mengatakan:

“Karena PIPPK ada unsur pemberdayaan, tidak hanya uang dari pemerintah tapi bagaimana mereka bisa berdaya melalui swadaya. Sekecil-kecilnya swadaya mereka adalah tenaga kerja mereka, minimal masyarakat menyediakan suguhan, itu merupakan bagian dari pemberdayaan bahwa masyarakat untuk bisa diberdayakan” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Dalam partisipasi melalui PIPPK, masyarakat terlibat secara aktif pada proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk pertanggungjawaban, dan tentunya ke depan memiliki harapan terhadap pemerintah Kota Bandung mengenai PIPPK, Ibu Ina Choerul Bariah selaku Sekretaris Kelurahan menyebutkan:

“Untuk harapannya, kita berharap bahwa PIPPK ini siapapun walikotanya, pemimpinnya bisa terus berlanjut bahkan kalau memungkinkan bisa terus ditingkatkan jumlahnya. Bagian dari pemerintah terbawah dalam struktur pemerintahan tentu kita lurah sebagai KPA pasti mendukung PIPPK ini untuk tetap berlanjut karena ini sangat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat, terutama penerima-penerima manfaat itu. Hanya memang untuk sosialisasi kepada masyarakat kita melalui beberapa jenjang, diawali dengan yang namanya rembug warga kemudian diangkat ke dalam musyawarah kelurahan melalui musrenbang dan lain sebagainya. Kita mempunyai forum-forum itu seperti pertemuan RW, itu mungkin merupakan bahan sosialisasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat sebetulnya memahami itu tidak hanya oleh kelurahan disampaikan kepada Lurah, RW dan RT, akan tetapi RW dan RT harus bisa menyampaikan kepada masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Otonomi dan pelaksanaan PIPPK tentunya masyarakat memiliki kewenangan dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola pembangunan

secara mandiri, melalui PIPPK ini Sekretaris Kelurahan, Ibu Ina Choerul Bariah mengatakan:

“Untuk pendanaan PIPPK yang disampaikan kepada LKK yang tadi, itu tidak berupa uang akan tetapi berupa kegiatan. Mereka mengajukan sebuah proposal kalau membuat jalan atau misalkan memperbaiki jalan, memperbaiki jalan itu apa yang dibutuhkan mereka membuat proposal. Misalkan mereka membutuhkan semen, pasir, batu, mereka buat proposalnya diberikan kepada kita kemudian kita yang akan mengontak penyedia atau dapat dikatakan matrialnya, nanti kita yang akan bayar kepada matrialnya itu pun sekarang sistemnya sudah tidak lagi tunai akan tetapi melalui proses non tunai atau melalui rekening” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

Kemudian untuk pengelolaan kegiatannya tentunya harus dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. Maka Ibu Ina Choerul Bariah mengatakan:

“Untuk pendanaan PIPPK yang disampaikan kepada LKK yang tadi, itu tidak berupa uang akan tetapi berupa kegiatan. Mereka mengajukan sebuah proposal kalau membuat jalan atau misalkan memperbaiki jalan, memperbaiki jalan itu apa yang dibutuhkan mereka membuat proposal. Misalkan mereka membutuhkan semen, pasir, batu, mereka buat proposalnya diberikan kepada kita kemudian kita yang akan mengontak penyedia atau dapat dikatakan matrialnya, nanti kita yang akan bayar kepada matrialnya itu pun sekarang sistemnya sudah tidak lagi tunai akan tetapi melalui proses non tunai atau melalui rekening” (Hasil wawancara pada 22 April 2018)

“Untuk pencairan, di pemerintahan itu ada sistem GU, TU dan RS kita memilih itu. Akan tetapi di Kelurahan Babakan Penghulu sendiri hanya memilih dua GU dengan TU, artinya bagaimana masyarakat penerima manfaat itu merencanakan, melaksanakan, dan bersama-sama mengawasi dengan kita” (Hasil wawancara pada 22 April 2018)

“Untuk realisasi tentu ada, karena ini juga akan bersangkut paut dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) itu pasti ada, setiap tahun kita buat tentang laporan itu” (Hasil wawancara pada 22 April 2018)

Dengan adanya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan

dilimpahkan kepada pemerintah kewilayahan dan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Untuk itu di Kelurahan Babakan Penghulu, ibu Inda Choerul Bariah mengatakan:

“Saat ini, untuk saat sampai bulan ini mungkin karena anggaran kita baru, perubahan anggaran atau pergeseran anggaran kurang lebih 10% anggaran PIPPK ini baru terakomodasi, kemudian di triwulan kedua baru kita akan mencoba untuk meningkatkan bagaimana persentase penyerapannya itu. Kalau tahun 2017, Alhamdulillah kita sudah di atas 90% untuk penyerapan PIPPK, untuk 2018 sampai menjelang triwulan kedua kita masih di bawah 10%” (Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2018)

### 3) PIPPK Kelurahan Babakan Penghulu

PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) di Kota Bandung dinilai sukses menghadirkan perubahan yang merata di masyarakat. Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Walikota Bandung M.Ridwan Kamil menuturkan bahwa konsep PIPPK adalah konsep yang paling benar dalam teori pembangunan apapun. Ia berpandangan bahwa pada hakikatnya, pembangunan adalah kebersamaan, antara pemerintah, masyarakat dan professional. Jika masyarakat sebuah negara telah mampu turut berpartisipasi dalam urusan pembangunan negara tersebut, itulah ciri negara yang beradab.

Melalui PIPPK, Bapak Ridwan Kamil yakin bahwa kota Bandung sudah dekat dengan tujuan itu. Jadi semangatnya di kelurahan, kecamatan, hingga di pusat, masyarakat harus menjadi lebih pintar, lebih sejahtera, dan lebih mandiri, bisa menolong diri sendiri, bisa mensejahterakan lingkungan sendiri, dan bisa menyukseskan program dengan inisiatif sendiri.

Bapak Ridwan Kamil menekankan, konsep PIPPK bukanlah program politik, melainkan murni teori pembangunan. Ia menjelaskan, PIPPK merupakan konsep desentralisasi di mana kekuatan pembangunan disebarakan secara merata ke seluruh wilayah dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mempercepat hadirnya perubahan.

Perubahan itu cepat karena dibelanjakan oleh masyarakat sendiri dikerjakan oleh masyarakat sendiri, supaya merata, tidak ada satu jengkal pun RW-RW yang tidak ada sentuhan pembangunan, supaya berdaya karena masyarakat yang mengerjakan dengan kerja sama.

Pada tahun 2017, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Anton Sugiana mengatakan ada beberapa penyempurnaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, yakni penyiapan instrument pedoman teknis dan membangun persamaan persepsi, filosofi, dan mekanisme PIPPK. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan juga menjadi fokus PIPPK tahun 2017.

Telah dipersiapkan berbagai instrument pengukuran keberhasilan pembangunan melalui PIPPK, antara lain pengukuran indeks kebahagiaan keluarga di tingkat kelurahan, indeks kemasyarakatan sebagai rapor tingkat ketaatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada juga pengukuran indeks pembangunan manusia lokal dari setiap kelurahan se-Kota Bandung. PIPPK yang dilaksanakan oleh Kelurahan dengan Lembaga Pemerintahan di bagi menjadi 4 lingkup, yaitu sebagai berikut:

1. PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)  
lingkup RW

2. PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kdewilayahan) lingkup TP.PKK
3. PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) lingkup Karang Taruna
4. PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

#### **4) Laporan PIPPK Kelurahan Babakan Penghulu Tahun 2016-2017**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan Babakan Penghulu Tahun 2016-2017 dianggarkan dari DPA perubahan PIPPK Lingkup Kelurahan di tahun 2016 sebesar Rp. 207,957,546,235 sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp. 1,095,618,799.00,. Namun dana yang terserap di Kelurahan Babakan Penghulu hanya sebesar Rp. 185,195,500.00 periode tanggal 01 Januari 2017 s/d 30 September 2017 dengan persentase 16,90%. Dan untuk lingkup RW Kelurahan Babakan Penghulu, setahun dari anggaran SKPD/Dinas terkait Kota Bandung hasilnya menjadi Rp.800,446,841.00, dan dana yang dapat diserap hanya sebesar Rp.775,182,600.00. Sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan efisiensi harga sebesar Rp.25,264,241.00 dengan total persentase sebesar 96,84%.

Realisasi anggaran kegiatan PIPPK tersebut direalisasikan untuk kebersihan, sosial ekonomi, penghijauan, fasilitas kelembagaan dan infrastruktur. Misalnya di tahun 2016, PIPPK mengadakan kegiatan urban farming yang dilakukan oleh PKK, selain itu adanya gerakan maghrib mengaji, kegiatan karang taruna, dan kegiatan LPM. Adapun kegiatan PIPPK di tahun

2017 yaitu merenovasi rumah yang tidak layak huni, pembuatan sarana air bersih, perbaikan jalan, perbaikan sarana air kotor, pembangunan gedung kantor RW di tiap-tiap RW yang ada di Kelurahan Babakan Penghulu, pembangunan MCK, pembuatan gazebo, kegiatan pemberian honorarium petugas sampah RW, pemasangan vertical garden, belanja kebersihan kepada setiap RW dan belanja bahan atau bibit tanaman kegiatan PIPPK lingkup RW.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2017 sebagaimana disebutkan bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemerintah Kelurahan Babakan Peenghulu agar berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemudian mewujudkan Kelurahan Babakan Penghulu yang bersih, tertib, tertata dan kondusif berlandaskan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat, serta terciptanya sosial budaya di lingkungan Kelurahan Babakan Penghulu yang ramah, tentram dan damai dengan menunjang toleransi sikap religious.

Dari hasil pemaparan di atas, akuntabilitas pengelolaan keuangan PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) di Kelurahan Babakan Penghulu dapat dikatakan sudah akuntabel mengingat setiap realisasinya telah dilaksanakan dan dilaporkan pada laporan kegiatan tahunan Kelurahan Babakan Penghulu dan juga penyerapannya mengalami peningkatan. Dengan adanya program ini tentunya sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat di level paling bawah bisa menjadi semakin berdaya. Di samping dapat memberdayakan masyarakat program ini dapat mendorong kehidupan ekonomi masyarakat, misalkan yang tadinya masyarakat tidak memiliki pekerjaan dengan adanya

program ini masyarakat menjadi ikut berperan aktif dalam membangun lingkungannya.

Namun, meskipun sudah dapat dikatakan akuntabel masih banyak yang harus di evaluasi dari kegiatan PIPPK ini, karena masih terdapat kendala dan hambatan di lapangan. Misalnya, pejabat birokrasi takut sehingga pencairan tertunda, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, keterbatasan SDM dalam pengelolaan dana PIPPK, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program PIPPK, dan kurangnya koordinasi antara aparat kewilayahan dengan SKPD.

Selain itu, di dalam PIPPK terdapat target-target yang belum tercapai dan masih memerlukan adanya evaluasi, seperti tersedianya pedoman pendampingan bagi pelaksanaan PIPPK, terlaksananya pendampingan wilayah dalam sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi PIPPK. Namun dalam evaluasinya tersedianya pedoman pendampingan bagi pelaksanaan PIPPK belum terlaksana secara optimal. Kemudian, terselenggaranya bimbingan teknis bagi Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan tentang petunjuk teknis PIPPK, terselenggaranya sinkronisasi DPA Kewilayahan dengan lingkup kegiatan yang ada di juknis PIPPK. Evaluasinya, pelatihan terlaksana sebagai pemahaman program PIPPK agar tepat sasaran. Kegiatan sosialisasi PIPPK di masyarakat, sosialisasi disetiap kelurahan dan kecamatan se-kota Bandung juga di tingkat kota Bandung oleh tim pengarah PIPPK, evaluasi yang harus dilakukan proses sosialisasi yang dilaksanakan perlu adanya pola sosialisasi yang lebih baik serta koordinasi tim pengarah



tingkat kota dan tim pengarah tingkat kecamatan, idealnya sosialisasi dilakukan oleh TP pengarah PIPPK kecamatan, belum terlaksana secara optimal, dan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengarah PIPPK kota Bandung bersama lembaga kemasyarakatan.

Adanya keterbukaan dalam membedah isi DPA, kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, musyawarah dan rapat-rapat penyusunan kegiatan. Keanggotaan lembaga kemasyarakatan merupakan representasi dari masyarakat di setiap Kelurahan se-Kota Bandung, terjadinya kesepakatan seluruh warga masyarakat di setiap kelurahan untuk menerima, menyusun kebutuhan pembangunan melalui PIPPK. Untuk evaluasinya baru hanya 38,7% kelurahan yang terbuka untuk membedah DPA dengan lembaga kemasyarakatan, kehadiran masyarakat hampir sudah memenuhi target di setiap tahapan kegiatan, hampir sebagian besar keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah perwakilan dari RT dan RW atau aktivis masyarakat di tingkat RT dan RW di setiap kelurahan se Kota Bandung, dan masih banyak usulan pembangunan yang tidak terakomodasi dalam DPA kelurahan, belum terdapat dokumen hasil rembuk warga dalam pemetaan swadaya berupa profile kelurahan, adanya usulan kegiatan yang sesuai dengan target program pemerintah kota Bandung yang terdokumentasikan dalam PJM kelurahan yang masih belum terealisasi.

Untuk tahapan pelaksanaan PIPPK, memiliki target hasil kegiatan musyawarah telah disebarluaskan kepada masyarakat luas, setiap pelaksanaan kegiatan ada papan informasi yang menggambarkan jumlah bantuan dan jenis kegiatan, setiap penerima manfaat PIPPK tersusun dari setiap lembaga

masyarakat. Untuk evaluasinya masih terbatas di lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan, dan belum terdokumentasikan di setiap kelurahan.

Pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) masih banyak yang harus disempurnakan karena masih banyak juga pelaksanaannya yang belum tepat sasaran. Dengan adanya system e-budgeting dalam perencanaan anggaran daerah dilakukan sebagai langkah penghematan. Salah satu factor masih rendahnya penyerapan dana PIPPK disebabkan karena ketidak pahaman atau bisa saja salah kode rekening.

